

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PERIKANAN

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utara,
Gedung Diklat II Lantai Dasar
R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 58 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dokumen Rencana Kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Pendek Dinas Perikanan Tahun 2023, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023;
- b. bahwa untuk memberikan gambaran rencana pembangunan Dinas Perikanan Tahun 2023, serta untuk tercapainya efektivitas dalam pekerjaan perlu adanya Rencana Kerja (Renja) agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Tahun 2023 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimukhtahirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 65);
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 103).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023.

Kesatu : Dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005 - 2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026;
11. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
12. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kepala Dinas Perikanan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Kedua : Renja Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Renja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2023.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2023.

Bab V : Penutup, berisi tentang Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023.

- Keempat : Renja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026.
- Kelima : Renja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Keenam : Kepala Dinas Perikanan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perikanan melalui monitoring dan evaluasi.
- Ketujuh : Renja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- Kedelapan : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku maka Renja Dinas Perikanan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.
- Kesembilan : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal, 30 Agustus 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023. Renja ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain rencana kerja tahun 2023, dalam dokumen Renja ini juga dijelaskan hasil atau capaian kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Perikanan tahun 2021 dan evaluasi tahun 2022 atau tahun berjalan dari triwulan I sampai triwulan II.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kabupaten Natuna pada masa sekarang dan yang akan datang.

Ranai, Agustus 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19730106 200012 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..	25
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	26
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V. PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel II.1. Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2021	8
Tabel II.2. Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021	8
Tabel II.3. Capaian Kinerja Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021	9
Tabel II.4. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021	10
Tabel II.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022 Triwulan I dan II	13
Tabel II.6. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2021	17
Tabel III.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023	26
Tabel IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dari penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan tujuan organisasi serta cara untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Perencanaan bukanlah sesuatu yang statis akan tetapi lebih bersifat dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga merupakan suatu siklus berkelanjutan yang akan mendasari semua organisasi utamanya dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder).

Menindaklanjuti perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, telah disiapkan dan disusun rencana kerja (Renja) guna mendukung dan mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Natuna. Penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan bentuk konkrit yang akan menjadi arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perencanaan tahunan dari Organisasi Perangkat daerah

yang bersangkutan. Sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan ini merupakan dokumen yang akan mengarahkan pelayanan dan pembangunan daerah di bidang perikanan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan serta akan menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu: (1) kemana pelayanan Dinas Perikanan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai di tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sudah dijelaskan tentang kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Jika mengacu pada aturan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- d. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- e. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perikanan;
3. Penyelenggaraan Pembinaan, Penyuluhan dan Bimbingan Usaha Perikanan dari Hulu sampai Hilir; dan
4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Dalam Batas Kewenangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 65).

13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 103);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2023 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2023.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai gambaran mengenai perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pada tahun 2023;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun; dan
- c. Sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan/perencanaan program dan kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan kinerja instansi Pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2023 sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan,** berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu,** berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;** berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2023.
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;** berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2023
- Bab V : Penutup,** berisi tentang Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perikanan Natuna adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perikanan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa rencana Kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2021 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan 2 (dua) tujuan yang tercakup dalam 3 (tiga) program yang mendukung indikator kinerja utama Dinas Perikanan.

Perubahan peraturan serta terbatasnya ketersediaan anggaran untuk Dinas Perikanan, menjadikan tujuan Dinas Dinas Perikanan yang mencakup 3 (tiga) program yang mendukung kinerja utama, hanya dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program pada tahun 2021 yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Meskipun terbatasnya anggaran pada Tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna melakukan berbagai upaya dalam mencapai target kinerja pada program yang tidak didukung anggaran agar realisasi program tersebut dapat tercatat dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu adanya kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, masyarakat dan Penyuluh Perikanan Bantu serta didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar) hasil perikanan. Pembentukan kelembagaan atau kelompok-kelompok masyarakat untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan turut mendukung tercapainya realisasi tersebut.

Capaian kinerja yang mendukung indikator kinerja utama Dinas Perikanan yang dievaluasi pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL II.1.
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	136.526,44	136.678,02	100,11

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi, dimana persentase produksi perikanan sebesar 100,11 %. Nilai produksi tersebut merupakan laporan produksi dari bidang yang diperoleh dari petugas teknis lapangan dinas perikanan yang ada di kecamatan. Data produksi perikanan diatas merupakan penjumlahan dari jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya. Secara detail jumlah produksi perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II.2.
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DAN JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	132.541,62	132.632,62	100,06
2.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.984,82	4.045,40	101,52

Selain melihat tingkat capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan, pengukuran atau capaian kinerja Dinas Perikanan juga diukur dengan membandingkan realisasi pada tahun 2020 dengan realisasi tahun 2021. Perbandingan realisasi ini diharapkan dapat melihat peningkatan jumlah produksi perikanan yang telah dicapai, sehingga dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk meningkatkan produksi perikanan ditahun-

tahun selanjutnya. Nilai produksi yang disajikan pada **Tabel.III.2.** diatas diperoleh dari tiap-tiap bidang yang membidangi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dimana nilai tersebut merupakan rekapitan data produksi tahun 2021 yang diperoleh dari tiap-tiap kecamatan.

TABEL II.3.
CAPAIAN KINERJA NILAI TUKAR NELAYAN TAHUN 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai Tukar Nelayan	%	100	100	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi dengan baik dimana sebesar 100 %. Hal ini didapat karena adanya kerjasama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat serta didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar) hasil perikanan. Pembentukan kelembagaan atau kelompok-kelompok masyarakat untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan turut mendukung tercapainya realisasi tersebut.

TABEL II.4.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021

KODE	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/P ROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI RENDA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2021 (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH
					5		6		7		I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6+12		15 = 14/5x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp RENJA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	4A	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6+12		15 = 14/5x100		16
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Nilai/Predikat	80	250,000,000	75.67	176,777,345	80	8,341,420	-	-	-	-	-	-	-	-	75.65	-	94.925	0	151.32	176,777,345.00	189	70.71	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Nilai/Predikat	80	250,000,000	75.67	176,777,345	80	8,341,420	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	75.67	176,777,345.00	95	70.71		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inisiasi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	10	250,000,000	8.00	176,777,345	2	8,341,420	0.00	-	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-	100	0	10.00	176,777,345.00	100	70.71	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	866,888,000	60	603,427,500	12	73,072,000	3.00	13,199,000.00	3.00	12,774,000.00	3.00	6,150,000.00	3.00	7,420,500.00	12	39,543,500.00	100.00	54.12	72	642,971,000	100.00	74.17	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	866,888,000	60	603,427,500	70	73,072,000	3.00	13,199,000.00	3.00	12,774,000.00	3.00	6,150,000.00	3.00	7,420,500.00	12	39,543,500.00	17.14286	54.12	72	642,971,000	100.00	74.17	
		Pemerataan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jenis alat tulis kantur yang disediakan	Jenis	420	866,888,000	519	603,427,500	70	73,072,000	39.00	13,199,000.00	32.00	12,774,000.00	12	6,150,000.00	20	7,420,500.00	71	39,543,500.00	101.43	54.12	590	642,971,000	140.48	74.17	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	9,845,726,924	60	6,084,643,926	12	347,944,555	3.00	15,468,800.00	3.00	53,847,839.00	3.00	34,545,344.00	3.00	130,682,925.00	12.00	234,544,908.00	100	67.41	72	6,319,188,834.00	100.00	64.18	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	9,845,726,924	60	6,084,643,926	12	347,944,555	3.00	15,468,800.00	3.00	53,847,839.00	3.00	34,545,344.00	3.00	130,682,925.00	12.00	234,544,908.00	100.00	67.41	72	6,319,188,834.00	100.00	64.18	
		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Luasan gedung kantor yang dipekai	M2	125	271,720,000	125	272,439,000	125	25,073,000	125	4,038,000.00	125	4,059,000.00	125.00	1,994,000	125	2,944,000	125	13,035,000.00	100.00	51.99	125.00	285,474,000.00	100.00	105.06	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pegawai dan baru	Orang	720	1,422,000,000	808	466,179,000	126	2,200,000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	808	466,179,000.00	112.22	32.78		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengarsipan	Jumlah bahan-bahan cetak dan fotocopy	Eksemplar	433,214	576,980,000	371,578	389,659,700	72,120	46,709,304	8,441	3,060,800.00	18,633	11,197,900.00	11,555	4,991,900	12,433	5,209,400	38,629	24,460,000.00	53.56	52.37	410,207	414,119,700.00	94.69	71.77	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan pegawai	Eksemplar	49	97,250,000	88	72,720,000	10	22,300,000	0	-	31.00	4,600,000.00	25	3,600,000	18	3,050,000	31.00	11,250,000.00	310.00	50.45	119	83,970,000.00	242.86	86.34	
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	OK	2,889	7,477,776,924	1,979	4,883,646,226	47	251,662,251	8	8,370,000.00	13.00	33,990,939.00	9	23,959,444	48.00	119,479,525.00	78	185,799,908.00	165.96	73.83	2,057	5,069,446,134.00	71.20	67.79	

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023

KODE	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/P ROGRAM/KEGATA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI RENJA PD TAHUN 2020	TARGET KINERJA ANGGARAN RENDAH PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENDAH 2021 (%)	REALISASI KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	PERANGK AT DAERAH									
								I		II		III		IV															
								1	2	3	4	4.A	5		6						7		8		9		10		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	6,467,881,650	60	4,880,213,706	12	1,013,077,200	3	167,500,000	3	206,178,000.00	3.00	204,171,500.00	3.00	191,428,624.00	12	769,278,124.00	100	75.93	72	5,629,491,830.00	100	87.04			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	6,467,881,650	60	4,880,213,706	12	1,013,077,200	3	167,500,000	3	206,178,000	3	204,171,500	3	191,428,624	12	769,278,124	100	75.93	72	5,629,491,830	100	87.04			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	72	231,678,000	60	140,620,200	12	14,122,000	3	1,000,000	3	3,861,000	3	2,461,000	3	2,461,000	12	9,783,000	100	69.27	72	150,403,200	100	64.92			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	72	1,362,329,000	60	709,478,704	12	165,063,000	0	-	6	40,917,000	4	40,310,500	2	20,108,000	12	101,335,500	100	61.38	72	810,814,204	100	99.52			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honoror/PTT	Orang	249	4,873,874,650	208	4,010,114,802	42	833,872,200	33	166,500,000	96	161,400,000	96	161,400,000	96	168,859,624	225	658,159,624	536	78.93	433	4,668,274,428	173.895923	95.78			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	85	4,251,422,500	100	1,438,686,760	75	150,204,696	70.83	11,408,646	195.83	43,342,326	104.17	17,845,229	31.25	6,580,788	266.66	79,176,989	355.55	52.71	367	1,517,863,749.00	431.36	35.70			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	85	4,251,422,500	100	1,438,686,760	75	150,204,696	70.83	11,408,646	195.83	43,342,326	104.17	17,845,229	31.25	6,580,788	267	79,176,989	355.55	52.71	367	1,517,863,749	431.36	35.70			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pezizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang dipelihara	Unit	260	3,823,922,500	320	1,213,616,760	48	117,459,696	34.00	11,408,646	94.00	31,402,326	50	14,635,229	15	6,580,788	193.00	64,025,989	402	54.51	513	1,277,643,749	197.31	33.41			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	72	427,500,000	88	225,070,000	12	32,745,000	0.00	-	16.00	11,940,000	3	3,210,000	-	-	19.00	15,150,000.00	158.33	46.27	107	240,220,000	148.61	96.19			
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	522,708.00	33,379,160,050	120,583.24	23,974,505,070.00	132,541.62	637,234,620.00	26,238.92	23,018,900.00	37,824.35	3,580,000.00	37,382.39	26,346,000.00	31,186.96	558,866,800.00	132,632.62	611,811,700.00	100.07	73.08	253,215.86	24,586,316,770	48.44	73.66		
		Pengelolaan Pemangsaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	522,708.00	33,379,160,050	120,583	23,974,505,070	132,541.62	634,734,620	26,238.92	23,018,900.00	37,824.35	3,580,000.00	37,382.39	26,346,000.00	31,186.96	558,866,800.00	132,632.62	611,811,700.00	100.07	96.39	253,216	24,586,316,770	48.44	73.66			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah jenis sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Jenis	26	33,379,160,050	23	23,974,505,070	2	634,734,620	0	23,018,900.00	-	3,580,000.00	-	26,346,000.00	2.00	558,866,800.00	2.00	611,811,700.00	100.00	96.39	25	24,586,316,770	96.15	73.66			

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023

KODE	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/P ROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA ANGGARAN RENDA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENDA 2021 (%)	REALISASI KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	PERAN AT DAER							
					I		II			III		IV																	
					1	2	3	4		4A	5	6	7	8	9	10	11						12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6+12	15 = 14/5x100	16		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	522,788.00	202,500,000	120,583.24	-	132,541.62	202,500,000	-	-	-	-	0	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	120,583	-	23.07	0.00
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Hasil Kajian Perikanan	Dokumen	2	202,500,000	-	-	2	202,500,000	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13,664.08	25,500,932,000	23,412.16	4,762,053,897	3,984.82	1,026,596,005	381.02	36,820,800.00	1,581.28	54,281,940.00	749.91	376,845,516.00	1,333.99	386,775,342.00	4,045.40	854,723,598.00	101.52	83.25802885	27,457.56	5,616,777,495	200.95	22.03			
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13,664.08	25,500,932,000	23,412.16	4,762,053,897	3,984.82	1,026,596,005	381.02	36,820,800	1,581.28	54,281,940.00	749.91	376,845,516.00	1,333.99	386,775,342.00	4,045.40	854,723,598.00	101.52	83.26	27,457.56	5,616,777,495	200.95	22.03			
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis prasarana perikanan budidaya	Jenis	44	22,300,932,000	24	4,656,265,897	5	658,264,050	0	1,830,000	-	20,724,490.00	4.00	352,145,516.00	1.00	358,859,342.00	5.00	733,559,348.00	100	85.47	29.00	5,389,825,245	65.90000091	24.17			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perikanan budidaya	Jenis	8	3,200,000,000	2	105,788,000	2	168,331,955	2	34,990,800.00	2.00	33,557,450.00	-	24,700,000.00	-	27,916,000.00	2	121,164,250.00	100.00	71.98	4	226,952,250.00	50.00	7.09			
					80,562,011,124		41,900,308,204		3,456,470,496								2,589,078,819.00						44,489,387,023.00						

Dari hasil evaluasi di atas, ada beberapa program dan kegiatan yang realisasinya pada triwulan II sudah mencapai 100% dan ada beberapa program dan kegiatan yang realisasi kinerjanya masih 0% atau belum ada progress sama sekali, hal ini dikarenakan adanya target kinerja yang sudah dilaksanakan pada triwulan II serta adanya target kinerja yang dilaksanakan pada triwulan III atau IV. Meskipun demikian, target dan realisasi kinerja Dinas Perikanan sampai dengan triwulan II masih berjalan dengan baik.

TABEL II.5.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 TRIWULAN I DAN II

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Penelitian/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah				
					4A	5	6	7	8	9	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16										
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretaria- ran yang sesuai SOP	Persen	90	41.461.448,085	80		80	8.292.289,617	80	11.972.139,788	72	1.547.808,990	72	1.531.531,207	144	3.079.340,197	180	26	224	3.079.340,197	249	7	Dinas Perikanan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Predikat/Nilai Akuntabilitas	81	500.000.000	75.67		76	100.000.000	76	56.340.200	0	0	80.71	7.868,054	81	7.868,054	106	14	156	7.868,054	193	2	Dinas Perikanan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	500.000.000	2		2	100.000.000	2	56.340.200	0	0	2	7.868,054	2	7.868,054	100	34	4	7.868,054	33	2	DinasPerikanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	27.431.311,585	1		1	5.394.614.317	1	4.453.734,016	1	1.178.668,761	1	1.097.793,684	2	2.276.462,445	200	51	3	2.276.462,445	300	8	Dinas Perikanan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	27.431.311,585	40		48	5.394.614.317	48	4.453.734,016	40	1.178.668,761	41	1.097.793,684	81	2.276.462,445	359	51	121	2.276.462,445	202	8	DinasPerikanan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	90	4.294.136,600	75		77	1.541.764,600	75	1.078.234,210	66.43	134.882,725	83.38	165.149,088	150	300.031,813	200	28	225	300.031,813	250	7	Dinas Perikanan
		Penyediaan Peralat dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralat dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	1.080.404,150	30		7	604.404,150	8	383.973,000	0	0	2	30.876,000	2	30.876,000	25	3	12	30.876,000	48	1	DinasPerikanan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	44.360,450	0		1	44.360,450	1	26.786,450	1	5.300,000	1	5.909,000	2	11.209,000	200	42	2	11.209,000	200	25	DinasPerikanan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.000,000	0		1	22.000,000	1	11.000,000	1	432,000	1	3.350,000	2	3.582,000	200	33	2	3.582,000	200	36	DinasPerikanan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	306.772,000	1		2	51.200,000	2	31.200,000	2	9.701,300	2	9.293,300	4	18.994,200	200	61	5	18.994,200	250	6	DinasPerikanan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	50	125.800,000	30		30	25.000,000	30	27.860,000	4	0	12	3.950,000	16	3.950,000	360	34	26	3.950,000	52	3	DinasPerikanan
		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/ Material	Paket	1	95.000,000	1		1	95.000,000	1	78.300,000	1	11.998,000	1	10.119,000	2	31.117,000	200	40	3	31.117,000	300	33	DinasPerikanan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	80	2.620.000,000	60		80	700.000,000	120	519.124,760	30	107.451,625	16	112.851,988	45	220.303,613	38	42	105	220.303,613	131	8	DinasPerikanan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	3.917.664,100	75		76	966.775,300	80	851.274,000	47	192.549,957	63	205.114,457	110	397.664,414	138	47	185	397.664,414	231	10	Dinas Perikanan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	121.800,000	0		12	14.400,000	12	16.261,000	3	2.988,000	3	3.012,000	6	6.000,000	50	37	6	6.000,000	50	5	DinasPerikanan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Perangkat Daerah								
									I	II															
1	2	3	4	4A	5		6		7		8	9	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	319.030.000	12		259.030.000	12	239.513.000	3	36.000	3	12.576.500	6	12.612.500	50	4	Dinas Perikanan					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	40	3.476.854.100	38	38	693.365.300	38	595.500.000	35	189.525.957	34	189.525.957	69	379.051.914	102	11	Dinas Perikanan					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Person	80	1.982.270.800	75	76	311.135.400	85	265.164.042	97	41.707.547	97	55.605.924	194	97.313.471	229	37	269	97.313.471	337	5	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	991.135.400	38	39	231.135.400	39	216.289.042	37	30.032.547	37	47.825.924	74	77.858.471	100	36	112	77.858.471	280	8	Dinas Perikanan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Unit	40	991.135.400	2	2	80.000.000	2	48.875.000	2	11.675.000	2	7.780.000	4	19.455.000	200	40	6	19.455.000	15	2	Dinas Perikanan	
	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Person	4.63	7.500.000.000	9.99	-	1.39	1.39	3.027.732.315	2.42	34.674.333	3.98	32.671.000	6	67.345.333	460	2	16	67.345.333	354	1		
		Pengelolaan Peningkatan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	#####	3.550.000.000	#####	#####	500.000.000	#####	1.612.493.000	26.874.54	14.051.340	39.328.59	21.742.000	66.203	35.793.340	49	2	106.60	35.793.340	143	1	Dinas Perikanan	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jenis	3	3.550.000.000	4	3	500.000.000	3	1.612.493.000	0	14.051.340	0	21.742.000	0	35.793.340	0	2	4	35.793.340	133	3	Dinas Perikanan	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitasi Kapasitas Nelayan	Person	22.18	3.950.000.000	37.78	11.57	700.000.000	75.00	1.415.239.315	0	20.622.993	0	10.929.000	0	31.551.993	0	2	38	31.551.993	170	1	Dinas Perikanan	
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	orang	170	2.275.000.000	135	30	425.000.000	170	1.137.768.020	0	20.622.993	0	10.929.000	0	31.551.993	0	3	135	31.551.993	79	3	Dinas Perikanan	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	kelompok	115	1.675.000.000	160	20	275.000.000	17	277.471.295	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	139	0	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Person	7.14	4.967.581.422	8.53	-	1.5	853.790.711	1.5	1.232.519.695	2.13	20.715.537	-1.94	68.391.351	0	89.106.888	13	7	9	89.106.888	122	2	Dinas Perikanan
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	93	2.736.000.000	10	-	14	251.000.000	10	252.591.695	0	0	4	7.973.112	4	7.973.112	40	3	14	7.973.112	15	0	Dinas Perikanan
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	39	2.736.000.000	44	-	30	251.000.000	30	252.591.695	0	0	0	7.973.112	0	7.973.112	0	3	44	7.973.112	113	0	Dinas Perikanan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Perangkat Daerah
					I	II	8	9	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16									
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4,342.72	2,231,581,422	4,045.40	-	4,106.08	602,790,711	4,106.08	979,928,000	467.08	20,715,537	1,417	60,418,239	1,884	81,133,776	46	81,133,776	137	4 Dinas Perikanan
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	15	2,231,581,422	2	-	3	602,790,711	2	979,928,000	0	20,715,537	0	60,418,239	0	81,133,776	0	81,133,776	13	4 Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan	Persen	10	3,751,372,133	174.43	-	2.00	600,000,000	2.00	732,892,220	1.91	12,393,440	14.66	35,628,020	17	48,021,460	829	48,021,460	1,910	1 Dinas Perikanan
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	Jumlah Kelompok yang dibina	Persen	21.05	1,391,372,133	1.42	-	2.68	200,000,000	2	260,394,080	0	380,500	0	15,952,270	0	16,332,770	0	16,332,770	7	1 Dinas Perikanan
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	65	1,391,372,133	5		10	200,000,000	10	260,394,080	0	380,500	0	15,952,270	0	16,332,770	0	16,332,770	8	1 Dinas Perikanan
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	Jenis	6	2,360,000,000	10	-	6	400,000,000	3	472,498,140	0	12,012,940	0	19,675,750	0	31,688,690	0	31,688,690	167	1 Dinas Perikanan
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pelaku Usaha	10	2,360,000,000	10		2	400,000,000	2	472,498,140	0	12,012,940	0	19,675,750	0	31,688,690	0	31,688,690	100	1 Dinas Perikanan
		UPT BALUBENIH IKAM																				Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	7.14	2,410,000,000	8.53	-	1.5	250,000,000	1.5	274,249,090	0	47,047,249	0	50,701,402	0	97,748,651	0	97,748,651	119	4 Dinas Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi benih Ikan	Ekor	40000	2,410,000,000	#####		20000	250,000,000	20,000	274,249,090	0	47,047,249	0	50,701,402	0	97,748,651	0	97,748,651	46	4 Dinas Perikanan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	2	1,345,000,000	95		2	250,000,000	2	274,249,090	0	47,047,249	0	50,701,402	0	97,748,651	0	97,748,651	4,750	7 Dinas Perikanan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Perikanan pada tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran hasil kinerja baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Indikator kinerja yang telah ditetapkan berupa jumlah produksi perikanan (jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya) yang menjadi tolak ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja dan nilai tukar nelayan. Pada tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada capaian sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan indikator jumlah produksi perikanan tercapai sebesar 100,11% dengan jumlah 136.678,02 Ton, sedangkan untuk target meningkatnya kesejahteraan nelayan juga tercapai dengan hasil persentase nilai tukar nelayan sebesar 100%.

Dalam mendukung keberhasilan kinerja Dinas Perikanan tahun 2021, ada 2 (dua) program dan kegiatan yang mendukung yaitu program pengelolaan perikanan tangkap dan program pengelolaan perikanan budidaya, dimana program tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari DAK bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2021, ada 1 (satu) program yang tidak bisa dijalankan yaitu program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti penyuluh perikanan bantu, petugas teknis lapangan serta melakukan peninjauan atau pendataan langsung pada lokasi atau daerah yang mudah dijangkau, sehingga data-data yang diperlukan dapat diperoleh dengan biaya yang sangat minim. Adapun penyebab tidak tersedianya anggaran untuk program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini karena adanya pandemi covid-19 sehingga konsentrasi pemerintah lebih kepada penanganan pandemi covid-19.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta ketersediaan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL II.6.
RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERIKANAN TAHUN 2021

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	7.744.132.164,60	7.186.019.905,00	92,79
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	77/BB Nilai/ Predikat	8,341,420,00	0	-
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	8,341,420,00	0	-
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	6.151.492.293,10	6.063.476.384,00	98,57
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6.151.492.293,10	6.063.476.384,00	98,57
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	73.072.000,00	39.543.500,00	54,12
	- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang di Sediakan	70 Jenis	73.072.000,00	39.543.500,00	54,12
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	347.944.555,50	234.544.908,00	67,41
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Luasan Gedung Kantor Yang di Pelihara	125 m ²	25.073.000,00	13.035.000,00	51,99
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pegawai dan Tamu	12 Bulan	2.200.000,00	0	-
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan-bahan Cetak dan Fotocopy	12 Bulan	46.709.304,00	24.460.000,00	52,37

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan Pegawai	12 Bulan	22.300.000,00	11.250.000,00	50,45
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	26 OK	251.662.251,50	185.799.908,00	73,83
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1.013.077.200,00	769.278.124,00	75,93
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	14.122.000,00	9.783.000,00	69,27
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	165.083.000,00	101.335.500,00	61,38
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	12 Bulan	833.872.200,00	658.159.624,00	78,93
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	75 Persen	150.204.696,00	79.176.989,00	52,71
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Yang di Pelihara	48 Unit	117.459.696,00	64.026.989,00	54,51
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang di Pelihara	12 Bulan	32.745.000,00	15.150.000,00	46,27
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	132,541.62 Ton	837.234.620,00	611.811.700,00	73,07
	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat di Usahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	132,541.62 Ton	634.734.620,00	611.811.700,00	96,39
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	2 Jenis	634.734.620,00	611.811.700,00	96,39
	2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	2 Dokumen	202.500.000,00	0	-

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUTPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
	- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	2 Dokumen	202.500.000,00	0	-
III.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3,984.82 Ton	1.026.596.005,00	854.723.598,00	83,26
	1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3,984.82 Ton	1.026.596.005,00	854.723.598,00	83,26
	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Prasarana Perikanan Budidaya	5 Jenis	858.264.050,00	733.559.348,00	85,47
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya	2 Jenis	168.331.955,00	121.164.250,00	71,98
	JUMLAH			9.607.962.789,60	8.652.555.203,00	90,06

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase capaian atau serapan anggaran Dinas Perikanan tidak ada yang mencapai angka 100%, hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran di daerah yang lebih memfokuskan pada penanganan pandemi covid-19 sehingga proses penyerapan anggaran menjadi terganggu atau berkurang, yang mengakibatkan banyaknya belanja pada tahun 2021 yang tidak bisa dibayarkan dan menjadi beban hutang pada tahun 2022. Selain dari itu, adanya kegiatan dan sub kegiatan yang dimasukkan pada APBDP Tahun 2021 yang tidak bisa dijalankan juga mempengaruhi penyerapan anggaran Dinas Perikanan pada tahun 2021.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menyusun perencanaan strategis dibutuhkan suatu gambaran yang jelas tentang kondisi daerah agar perencanaan suatu program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut. Informasi yang jelas akan memudahkan bagi organisasi untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi kendala serta solusi dalam pembangunan terutama di bidang perikanan.

Dalam mencapai keberhasilan kinerja tentunya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan kinerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang sering muncul dalam mencapai keberhasilan kinerja yang dilakukan setiap tahunnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi serta kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan/Faktor Penghambat

- Kurangnya armada penangkapan ikan yang memiliki tonase yang besar.
- Masih rendahnya keterampilan dan keahlian nelayan lokal.
- Penggunaan alat tangkap yang masih tradisional.
- Kurangnya ketersediaan SPDN di kecamatan-kecamatan yang jauh dari kabupaten.
- Belum optimalnya pengelolaan atau pemanfaatan potensi perikanan tangkap yang ada.
- Kurangnya ketersediaan pabrik es dan cold storage di kecamatan-kecamatan.
- Kurangnya keahlian bagi pelaku usaha budidaya.
- Belum adanya penerapan penggunaan benih/bibit ikan yang berstandar SNI.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya.

- Kurangnya minat pelaku usaha perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan) untuk membentuk kelompok dalam menjalankan usaha.
- Masih adanya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan.
- Masih maraknya pelaku *illegal fishing* dari negara-negara tetangga.

2. Faktor Pendukung

- Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pemberian dana yang sangat memadai. Banyak program yang diluncurkan dalam usaha memajukan sektor kelautan dan perikanan seperti Program PSKPT (Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang merupakan program yang sangat besar untuk membangun pelabuhan perikanan beserta seluruh fasilitas pendukung yang bersifat nasional;
- Adanya dukungan dari instansi - instansi terkait sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat berjalan baik;
- Peran Penyuluh Perikanan Bantu, memberikan dukungan berupa pendampingan bagi masyarakat pesisir baik nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah perikanan. Aktifitas para penyuluh yang sehari-hari mendampingi masyarakat di lapangan sangat membantu dalam meningkatkan usaha mereka dalam mengolah sumberdaya alam yang ada. Selain pendampingan usaha, para penyuluh juga mendampingi masyarakat dalam berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah dan dunia usaha.
- Besarnya potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Natuna.

3. Solusi/Alternatif Yang Dapat Dilakukan

- Perlunya armada penangkapan ikan dengan kapasitas tonase yang besar.
- Perlunya pelatihan keahlian dan keterampilan bagi nelayan lokal sehingga dapat bersaing dengan nelayan dari luar.
- Perlu adanya modernisasi alat tangkap untuk nelayan tradisional.

- Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat memberantas pelaku *illegal fishing*.
- Petaan kelembagaan dan pendataan potensi perikanan yang ada.
- Mengadakan pelatihan CBIB bagi pembudidaya ikan.
- Perlunya pelatihan atau bimtek manajemen usaha bagi nelayan, pembudidaya dan pengolahan.
- Meningkatkan keterampilan SDM, baik nelayan, pembudidaya, pengolahan, penyuluh dan ASN yang membidangi perikanan.
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada Kelompok
- Melaksanakan bimbingan teknis penerapan cara pengolahan ikan yang baik bagi UMKM/Pengolah Hasil Perikanan melalui kegiatan peningkatan mutu nilai tambah dan diversifikasi usaha.
- Fasilitasi pameran produk olahan hasil perikanan ke luar daerah untuk mempromosikan ragam dan jenis produk olahan unggulan perikanan Kabupaten Natuna.
- Bimbingan teknis pemasaran produk olahan hasil perikanan berbasis online marketplace atau website online.
- Sosialisasi dan Fasilitasi Perizinan Usaha baik perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan RPJMD. Renja tahun 2023 secara umum telah sesuai dengan anggaran yang disediakan, karena penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan tahun 2021 – 2026 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Perikanan yang telah ditetapkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai upaya mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, terutama partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain kelembagaan yang ada di masyarakat, pemuda dan tokoh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna didiskusikan kembali di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan. Pembahasan juga dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 sesuai dengan misi Presiden yang termasuk dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan terutama bidang kelautan dan perikanan yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Selain mengacu pada RPJMN, pembangunan bidang kelautan dan perikanan harus diselaraskan dengan Renstra Perubahan Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia Tahun 2021 – 2024. Dimana dalam mencapai salah satu agenda pembangunan Presiden yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi **Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Dalam mencapai visi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai misi :

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Peningkatan Kualitas RB di KKP

Untuk mencapai misi tersebut, terdapat beberapa tujuan yaitu:

- a. Optimalnya pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya daya saing, pengendalian mutu hasil KP, keamanan hayati ikan dan meningkatnya pengawasan pengelolaan SDKP
- b. Optimalnya pengelolaan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan KKP

Dilihat dari kebijakan nasional dalam pembangunan yang telah ditetapkan, serta Renstra Perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2021 – 2024, maka Rencana Kerja Dinas Perikanan dapat diselaraskan terutama untuk menunjang visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satunya memiliki tujuan untuk mengoptimalkana pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya daya saing, pengendalian mutu hasil KP, keamanan hayati ikan dan meningkatnya pengawasan pengelolaan SDKP, yang berkaitan dengan target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yaitu jumlah produksi perikanan yang terdiri dari jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta jumlah produksi olahan produk perikanan yang harus dicapai setiap tahunnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu). Dengan adanya tujuan maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis Dinas Perikanan serta Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna, maka dapat dirumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun yang telah direncanakan.

Dalam meningkatkan ekonomi sektor perikanan, target yang telah ditetapkan Dinas Perikanan pada tahun 2023 dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan (Ton)	(Ton)	139.331,64
		Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	(Ton)	427,27
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	Predikat/ Nilai	BB/77
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,47

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural*** yang dijabarkan dalam beberapa misi, Dinas Perikanan bertanggungjawab secara langsung untuk mencapai misi kedua yaitu ***Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dengan tujuan Meningkatkan perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan.***

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupten Natuna Tahun 2023 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Natuna ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya perikanan saat ini. Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui

program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan yang telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana yang terurai dibawah ini.

➤ **Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2023**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan :

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan :

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Penyediaan Bahan/Material;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan :

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan :

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.

Kegiatan :

- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil.

Kegiatan :

- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan :

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Kegiatan :

- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna telah menyusun kebutuhan anggaran guna mendukung capaian kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2023. Adapun kebutuhan anggaran tahun 2023 yang telah disusun dapat dilihat pada tabel matrik Renja Dinas Perikanan Tahun 2023 dibawah ini.

TABEL IV.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2023	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	8	9
2.1.1.1.1.	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB	Persen	30.81	31 ,06	2,743,790,711
2.1.1.1.1.	MENINGKATNYA EKONOMI SEKTOR PERIKANAN	PRODUKSI OLAHAN PRODUK PERIKANAN (TON)	Ton	410.69	427.27	700,000,000
2.1.1.1.1.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI OLAHAN PERIKANAN	Persen	174.43	2.00	700,000,000
2.1.1.1.1.06.2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	Unit	5	2	100,000,000
2.1.1.1.1.06.2.01.01.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	0	1	100,000,000
2.1.1.1.1.06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	1.42	3 ,44	200,000,000
2.1.1.1.1.06.2.02.01.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	5	10	200,000,000
2.1.1.1.1.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	Jenis	10	6	400,000,000
2.1.1.1.1.06.2.03.01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	5.332,22	5.593 ,53	100,000,000
2.1.1.1.1.06.2.03.02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	10	2	300,000,000

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2023	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	8	9
2.1.1.1.1.1.	MENINGKATNYA EKONOMI SEKTOR PERIKANAN	PRODUKSI SEKTOR PERIKANAN (TON)	Ton	136.678,02	139.331,64	2,043,790,711
2.1.1.1.1.1.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Persen	9.99	0.51	1,200,000,000
2.1.1.1.1.1.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	132.632,62	135.170,96	300,000,000
2.1.1.1.1.1.03.2.01.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	4	3	300,000,000
2.1.1.1.1.1.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Kapasitas Nelayan Kecil	Persen	37.78	18.67	750,000,000
2.1.1.1.1.1.03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	135	30	250,000,000
2.1.1.1.1.1.03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	160	20	250,000,000
2.1.1.1.1.1.03.2.02.03.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	47	10	250,000,000
2.1.1.1.1.1.03.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Unit	0	0	150,000,000
2.1.1.1.1.1.03.2.03.01.	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	0	1	150,000,000
2.1.1.1.1.1.03.2.03.02.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	0	0	-
2.1.1.1.1.1.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Persen	8.53	1,33	843,790,711
2.1.1.1.1.1.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	93	14	250,000,000
2.1.1.1.1.1.04.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	44	6	100,000,000
2.1.1.1.1.1.04.2.02.03.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	4	0	-
2.1.1.1.1.1.04.2.02.04.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	45	8	150,000,000
2.1.1.1.1.1.04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.045,40	4.160,68	593,790,711
2.1.1.1.1.1.04.2.04.01.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	200,000,000

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2023	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	8	9
2.1.1.1.1.1. 04.2.04.0 2.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	3	193,790,711
2.1.1.1.1.1. 04.2.04.0 3.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	200,000,000
6.1.1.1.1. .	MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	Nilai	75.67	77	100,000,000
6.1.1.1.1. .1.	MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI LAKIP	Nilai/Predik at	75.67	77.00	100,000,000
6.1.1.1.1. .1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	75.67	77	100,000,000
6.1.1.1.1.1. 01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Persen	75.67	77	100,000,000
6.1.1.1.1.1. 01.2.01.0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,000,000
6.1.1.1.2. .	TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	Indeks	3.44	4.3	8,292,289,617
6.1.1.1.2.1. .	MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks	3.46	3.47	8,292,289,617
6.1.1.1.2.1. .01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	80	85	8,292,289,617
6.1.1.2.1. 01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1	5,401,924,317
6.1.1.2.1. 01.2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n	40	48	5,401,924,317
6.1.1.2.1. 01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	84	86	220,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.05.0 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	26	8	110,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.05.1 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	26	8	110,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	95	100,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.05.0 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1	100,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	80	708,093,100
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	2	119,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	-
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	-

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2023	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	8	9
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	63,893,100
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10	25,200,000
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	-
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	80	480,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.06.1 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	30	20,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.07. 01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	78	872,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.07.0 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	38	1	250,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.07.0 5.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	290	15	212,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	117	20	360,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.07.0 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	25,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.07.0 8.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	1	25,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.08. 01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	77	737,272,200
6.1.1.2.1. 01.2.08.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	12	26,400,000
6.1.1.2.1. 01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	15,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	38	38	695,872,200
6.1.1.2.1. 01.2.09. 01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	77	253,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	48	190,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.09.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	98	15,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.09.0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	48,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.09.1 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas Dinas Perikanan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat administrator, pengawas dan fungsional di Dinas Perikanan agar dapat mengawal pelaksanaan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2023 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2023.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Perikanan diharapkan dapat berperan aktif dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Perikanan Tahun 2023, maka penetapan

prioritas pembangunan pada urusan pemerintahan pilihan bidang perikanan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Dinas Perikanan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang telah ditetapkan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.